



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED
TA 2023



BALAI KIPM BANJARMASIN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarmasin, 18 Januari 2024

Kepala,



Hafid Rahman, S.Pi., M.P.

NIP. 19681223 198903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	2
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca	37
D. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional	56
E. Penjelasan Atas Perubahan Laporan Perubahan Ekuitas	67
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	73
VI. Lampiran dan Daftar	



**Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin**
Jl. Ahmad Yani KM 29.42 Guntung Manggis Banjarbaru-Kalsel

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarmasin, 18 Januari 2024

Kepala



Hafit Rahman, S.Pi., M.P.

NIP. 19681223 198903 1 001

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 67,260,000 atau mencapai 130.34 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 51.600.000

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8,877,449,976 atau mencapai 99.43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8,927,985,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21,074,237,158 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 113,888,110 ; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp. 0 ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 20,960,349,048 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 28,800,666 dan Rp. 21,045,436,492.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (9,132,167,475) sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 9,191,828,714 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. . (9,124,568,714) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 6,048,460 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (9,132,167,475).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal (1 Januari 2023) adalah sebesar Rp. 21,368,860,740 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (9,132,167,475) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 8,808,743,227 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp. 21,045,436,492.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Sep-23		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	51.600.000	67,260,000	130.34	73,765,000
JUMLAH PENDAPATAN		51.600.000	67,260,000	130.34	73,765,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	5,162,204,000	5,120,765,275	99.20	5,205,025,101
Belanja Barang	B.4	3,438,463,000	3,430,467,801	99.77	2,807,709,090
Belanja Modal	B.5	327,318,000	326,216,900	99.66	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	B.2	8,927,985,000	8,877,449,976	99.43	8,012,734,191

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BALAI KIPM BANJARMASIN
N E R A C A
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2023	2022
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
	Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
	Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
	Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
	Persediaan	C.10	113,888,110	447,466,964
	Jumlah Aset Lancar		113,888,110	447,466,964
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.14	14,422,138,000	14,422,138,000
	Peralatan dan Mesin	C.15	9,301,909,631	9,777,881,283
	Gedung dan Bangunan	C.16	6,436,355,487	6,236,635,487
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	319,220,500	319,220,500
	Aset Tetap Lainnya	C.18	15,650,000	15,650,000
			-	-

	Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(9,534,924,570))	(9,808,885,864)
	Jumlah Aset Tetap		20,960,349,048	20,962,639,406
ASET LAINNYA				
	Aset Tidak Berwujud	C.21	-	
	Aset Lain-Lain	C.22	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
	Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			21,074,237,158	21,410,106,370
KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	28,800,666	41,245,630
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
	Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28,800,666	41,245,63
JUMLAH KEWAJIBAN			28,800,666	41,245,630
EKUITAS				
	Ekuitas	C.28	21,045,436,492	21,368,860,740
	JUMLAH EKUITAS		21,045,436,492	21,368,860,740
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			21,074,237,158	21,410,106,370

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM BANJARMASIN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	67,260,000	73,765,000
JUMLAH PENDAPATAN		67,260,000	73,765,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5,108,103,275	5,156,199,643
Beban Persediaan	D.3	382,015,638	566,982,044
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,758,581,041	1,738,684,344
Beban Pemeliharaan	D.5	1,021,846,567	507,654,235
Beban Perjalanan Dinas	D.6	597,435,235	333,768,221
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	323,846,958	744,198,779
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		9,191,828,714	9,047,487,266
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9,124,568,714)	(8,973,722,266)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
		D.11	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(1,550,301)	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3,109,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		4,660,300	4,660,300
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6,048,460)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(7,598,761)	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9,132,167,475)	(8,973,722,266)

POS LUAR BIASA		D.12		
Pendapatan PNB			-	-
Beban Perjalanan Dinas			-	-
Beban Persediaan			-	-
SURPLUS/DEFISIT LO			(9,132,167,475)	(8,973,722,266)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM BANJARMASIN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	21,368,860,740	22,400,572,315
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9,132,167,475)	(8,973,722,266)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8,808,743,227	7,942,010,691
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(323,424,248)	(1,031,711,575)
EKUITAS AKHIR	E.6	21,045,436,492	21,368,860,740

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai KIPM Banjarmasin

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Raya Ahmad Yani KM 29.42 Guntung Manggis Banjarbaru Kalimantan Selatan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Selain itu, BKIPM Banjarmasin juga memiliki tugas dan fungsi yakni melakukan pengawasan keamanan hayati ikan. Melalui peran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

b. Fungsi :

- penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
- pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;

- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan

operasional dan laboratorium;

- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Banjarmasin, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Satker Pelabuhan Trisakti, Wilker Batulicin dan Wilket Kotabaru

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

1. *Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
2. *Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
3. *Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

1. *Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
2. *Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
3. *Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*
4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*

5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai KIPM Banjarmasin Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Balai KIPM Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai KIPM Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Balai KIPM Banjarmasin. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi

berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

	Piutang Negara/DJKN	
--	---------------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Banjarmasin melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 sebanyak 11 kali dan terdapat perubahan total pagu anggaran DIPA dari semula Rp. 8,927,985,000 menjadi sebesar Rp. 8,927,985,000

1. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-1 Revisi Gaji PPNPN
2. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-2 Revisi Hal III DIPA TW I
3. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-3 Revisi Hal III DIPA TW II dan POK
4. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-4 Revisi Blokir AA pada Belanja Modal Instalasi Karantina
5. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-5 Revisi Hal III DIPA TW III dan POK
6. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-6 Revisi Pemenuhan Gaji PPPK
7. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-7 Revisi Belanja Pegawai
8. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-8 Revisi POK
9. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-9 Revisi Potensi Blokir Perjalanan Dinas.

10. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-1 Revisi POK
11. 30 November 2022, DIPA-032.13.2.649593/2023 Revisi Ke-11 Revisi POK

Adapun rincian DIPA Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2023 SEMULA	ANGGARAN 2023 MENJADI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	51.600.000	51.600.000
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	51.600.000	51.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5,162,204,000	5,162,204,000
Belanja Barang	3,438,463,000	3,438,463,000
Belanja Modal	327,318,000	327,318,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	8,927,985,000	8,927,985,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp 67,260,000*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 67,260,000 atau mencapai 130,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 51.600.000 Pendapatan Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	51.600.000	67.260.000	130,35
Pendapatan dari Penjualan Aset	-	-	-
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Jumlah	51.600.000	67.260.000	130,35

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami Penurunan sebesar 8,81 persen

dibandingkan TA 2022. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Balai KIPM Banjarmasin

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 30 September 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	67.260.000	73,765,000	8.81
Pendapatan Penjualan Aset	0	0	
Pendapatan TAYL	0	0	
Jumlah	67.260.000	73,765,000	8.81

*Realisasi Belanja
Rp8,877,449,976*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8,877,449,976 atau 99.43%% dari anggaran belanja sebesar Rp. 8,927,985,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,162,204,000	5,120,765,275	99.20
Belanja Barang	3,438,463,000	3,430,467,801	99.77
Belanja Modal	327,318,000	326,216,900	99.66
Belanja Bantuan Sosial	-		
Total Belanja Kotor	8,927,985,000	8,877,449,976	99.43
Pengembalian			
Jumlah	8,927,985,000	8,877,449,976	76,56

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,97% seperti tertera pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,120,765,275	5,205,025,101	1,06
Belanja Barang	3,430,467,801	2,807,709,090	7,91
Belanja Modal	326,216,900	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	8,927,985,000	8,012,734,191	8,97

Belanja Pegawai
Rp. 5,120,765,275

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 5,120,765,275 dan Rp. 5,205,025,101 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar (1.06)% dari TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pegawai pension dan mutase ke UPT lain.

*Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.932.517.338	5.025.095.115	(1,06)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	105,582,937	56.965.986	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	82.665.000	122,964,000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5,120,765,275	5,205,025,101	(1,06)
Pengembalian Belanja Pegawai		-	
Jumlah Belanja	5,120,765,275	5,205,025,101	(1,06)

Belanja Barang
Rp. 3,430,467,801

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 3,430,467,801 dan Rp. 2,807,709,090,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.22 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,202,703,85	1,097,809,436	1,09
Belanja Barang Non Operasional	186,179,361	193,039,402	(41,27)
Belanja Barang Persediaan	343,037,113	325,867,271	(20,99)
Belanja Jasa	369,480,793	425,974,809	(6,85)
Belanja Pemeliharaan	431,249,951	431,249,951	40,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	597,435,235	333,768,221	43,01
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,430,467,801	2,807,709,090	1,29
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3,430,467,801	2,807,709,090	1,22

*Belanja Modal
Rp. 326,216,900*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 326,216,900 dan Rp. 0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100 % dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326,216,900	0	100
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	326,216,900	0	100

Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	326,216,900	326,216,900	100

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pada periode ini belum terdapat belanja Modal Tanah pada Balai KIPM Banjarmasin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 326,216,900 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 56,49% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,496,900	0	100
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,000,000	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	164,720,000	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	326,216,900	0	100

Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	326,216,900	0	100

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 35,000,000 dan Rp 0. Pada periode ini belum terdapat belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Banjarmasin.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung Balai KIPM Banjarmasin	35,000,000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	35,000,000	0	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Penambahan Nilai Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	126,496,900	0	100,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja	126,496,900	0	100,00

B.5.6 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,-.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	164,720,000	0	100,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	164,720,000	0	100,00

B.5.7 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya pada tahun 2023 maupun tahun sebelumnya.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada Balai KIPM Banjarmasin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai di Brankas	0	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Rincian di atas sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir: FPK-PENGB5ucFHQaGNaGtPo pada tanggal 29 Desember 2023. Selisih Rp 0.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik melalui mesin EDC, pengguna jasa karantina langsung membayar tagihan/billing tersebut melalui mesin EDC.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Rincian kas di bendahara penerimaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi saldo Buku Kas Umum Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir : - terlampir pada laporan keuangan Balai KIPM Banjarmasin tahun anggaran 2023.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp 0*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember dan 2022 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR

adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp. 0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
per 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp. 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.
113,888,110*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 113,888,110 dan Rp. 263.037.646. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	12,123,692	96.717.617
Barang untuk Pemeliharaan	561,000	52.800
Suku Cadang	4,416,800	83.702.184
Pita Cukai, Materai dan Leges		
Persediaan lainnya		
Persediaan bahan baku	96,786,618	82.565.045
Jumlah	113,888,110	263.037.646

Persediaan barang konsumsi terdiri atas belanja alat tulis kantor, sticker fish quarantine check, pencetakan map dan amplop. Persediaan bahan baku terdiri atas belanja bahan uji laboratorium dan bahan sanitasi.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : BKIPM.BJM/KP.440/XII/2023 tanggal 31 Desember

2023

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1			
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0

Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.
14.422.138.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 14.422.138.000 dan Rp 14.422.138.000. Tidak terdapat kenaikan nilai aset tanah pada tahun ini. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	14.422.138.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2023	14.422.138.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

*Rincian Tanah
per 31 Desember 2023*

No	KIB	Luas	Nilai 2023	Nilai 2022
1	1	510	682.429.000	682.429.000
2	2	992	1.166.499.000	1.166.499.000
3	3	1869	11.749.282.000	11.749.282.000
4	4	560	823.928.000	823.928.000
			14.422.138.000	14.422.138.000
Jumlah			28.844.276.000	28.844.276.000

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
9,301,909,631*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 9,301,909,631 dan Rp. 9,777,881,283. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Banjarmasin
Periode Semester II Tahun 2023
Per 31 Desember 2023

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		1.047	9.301.909.631		
Mutasi Tambah		-	-	-	-
100	Penambahan Saldo Awal	-	-	-	-
101	Pembelian			-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan			-	-
Saldo Akhir Per 30 September 2023 (Unaudited)		1.047	9.301.909.631	-	-

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
6,436,355,487*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 6,436,355,487 dan Rp. 6,236,635,487. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Banjarmasin
Periode Semester II Tahun Anggaran 2023,
Per 31 Desember 2023

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		11	6.436.355.487	1	6.436.355.487
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	-	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	-	-	-	-
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
245	Koreksi Barang Berlebih Penilaian Kembali	-	-	-	-
238	Koreksi Hasil Revaluasi Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Reval	-	-	-	-
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-	-	-	-
335	Koreksi Reklas Keluar Akibat Penilaian Kembali	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	-	-	-	-
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-	-	-
229	Koreksi Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-	-	-	-
240	Koreksi Reklas Masuk Akibat Penilaian 225	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 30 September 2023 (Unaudited)		11	6.436.355.487	1	6.436.355.487

Pada periode Semester II tahun anggaran 2023 tidak terdapat penambahan aset gedung dan bangunan. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
319.220.500*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 319.220.500 dan Rp. 319.220.500. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Banjarmasin
Periode Semester II Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2023	319.220.500
Mutasi tambah:	
Pembangunan	
Saldo per 31 Desember 2023	319.220.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	319.220.500

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 15,650,000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 15,650,000 dan Rp. 0. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada periode ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Banjarmasin
Periode Semester II Tahun Anggaran 2023,
Per 31 Desember 2023

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		-	-
Mutasi Tambah		-	-
101	Pembelian		
107	Reklasifikasi Masuk	-	-
Mutasi Kurang		-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 30 Desember 2023 (Unaudited)		-	-

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp 0. Pada tahun ini, Balai KIPM Banjarmasin tidak melakukan pembangunan gedung.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
(9,534,924,570)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember adalah Rp (9,534,924,570) dan Rp Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023*

AKUN NERACAKELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
102111	Peralatan dan Mesin		108	30.307.396	27.270.883	3.036.513
3002	ALAT ANGKUTAN DARAT TAN BERMOTOR		1	200.000	200.000	0
3003	ALAT PENGOLAHAN		3	2.588.000	1.881.000	627.000
3004	ALAT KANTOR		4	1.812.308	1.752.308	159.998
3005	ALAT RUMAH TANGGA		89	20.017.500	19.086.000	1.410.000
3006	ALAT STUDIO		25	4.129.400	3.425.189	704.211
3007	UNIT ALAT LABORATORIUM		6	1.039.500	913.000	126.500
	J U M L A H			30.307.396	27.270.883	3.036.513

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud Rp. 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 30 September 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp. 0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 September 2023	-

Rincian Aset Lain-lain tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN RP 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 28,800,666

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp

28,800,666 dan Rp 41,245,630. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai KIPM Banjarmasin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga	91.774	Pembayaran Belanja Barang Langganan Telepon
Utang kepada Pihak Ketiga	1.801.677	Pembayaran Belanja Barang Langganan PDAM
Utang kepada Pihak Ketiga	6.262.630	Pembayaran Belanja Barang Langganan Daya dan Jasa (internet)
Utang kepada Pihak Ketiga	20.644.585	Pembayaran Belanja Barang Langganan Listrik
Total	28,800,666	

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp 0*

C.26 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang yang belum ditagihkan	0	
Total	11,584,260	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp. 21,045,436,492

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 21,045,436,492 dan Rp. 21,368,860,740 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp 67,260,000

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	67,260,000	73,765,000	8.81
Pendapatan Penjualan Aset			-
Pendapatan TAYL			-
Jumlah	67,260,000	73,765,000	8.81

Pendapatan jasa berasal dari pendapatan sensor jasa karantina yang diperoleh oleh Balai KIPM Banjarmasin selama periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Pendapatan PNB Balai KIPM Banjarmasin dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca Semester II TA 2023 secara horizontal sebagai berikut :

6) Analisis horizontal antara LO LRA dan Neraca

Pendapatan PNB (LO) harus sama dengan Pendapatan PNB (LRA) dikurangi Piutang PNB Awal Tahun ditambah Piutang PNB Akhir Tahun	Pendapatan PNB (LO) = Pendapatan PNB (LRA) - Piutang PNB Awal Tahun + Piutang PNB Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PNB (LO)	67,260,000
PENDAPATAN PNB (LRA)	67,260,000
PIUTANG PNB AKHIR TAHUN (NERACA)	0
PIUTANG PNB AWAL TAHUN (NERACA)	0
Selisih	-0
 PENJELASAN :	

Beban Pegawai
Rp 5,108,103,275

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 5,108,103,275 dan Rp 5,156,199,643. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	5,108,103,275	5,156,199,643	0.93
Jumlah beban pegawai	5,108,103,275	5,156,199,643	0.93

Beban Persediaan
Rp 382,015,638

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 382,015,638 dan Rp. 566,982,044. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023
Beban Persediaan Konsumsi	95,499,188
Beban Persediaan Bahan Baku	21,541,400

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	
Beban Persediaan suku cadang	
Beban persediaan lainnya	-
Jumlah Beban Persediaan	382,015,638

Beban Pemeliharaan Rp 1,758,581,041

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp. 1,758,581,041 dan Rp. 1,738,684,344. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan Dinas Rp 597,435,235

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 597,435,235 dan Rp 333,768,221. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Balai KIPM Banjarmasin tidak ada beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat.

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 323,846,958

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 323,846,958 dan Rp 388,562,675. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp. 7,598,761*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar	(1,550,301)	0	0
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0

Beban pelepasan aset non lancar	(1,550,301)	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(6,048,460))	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	6,048,460	0	0
Beban Kegiatan	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7,598,761	0	0

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
21,368,860,740*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 21,368,860,740 dan Rp 22,400,572,315.

*Defisit LO
Rp(9,132,167,47)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (9,132,167,475) dan Rp (8,973,722,266) . Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 8,808,743,227*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 8,808,743,227 . Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,877,449,976
Diterima dari Entitas Lain	(70,369,999)
Transfer Masuk	1,663,250
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	8.808.743.227

E.4.1 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga 30 September 2023, Transfer Keluar sebesar Rp 0 sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp 0.

Transfer masuk persediaan barang konsumsi berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dari Sekretariat BKIPM pada Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sejumlah 250 eksemplar dengan berbagai jenis dengan nilai total keseluruhan Rp 0.

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	Rp -
2	PT Semua Bahagia	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp
21,045,436,492

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp. 21,045,436,492 dan Rp. 21,368,860,740.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

- Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Banjarmasin I melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 sebanyak 11 kali dan terdapat perubahan total pagu anggaran DIPA dari semula Rp. 8,927,985,000 menjadi sebesar Rp. 8,927,985,000 . Berikut revisi DIPA yang dilakukan Balai KIPM Banjarmasin yaitu :

- a. REVISI Gaji PPNPN tanggal 20 Januari 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- b. REVISI HALAMAN III DIPA TW-1 tanggal 12 Februari 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- c. REVISI HAL III DIPA TW-2 dan POK tanggal 13 April 2023. (revisi terlampir).
- d. REVISI BLOKIR AA Pada Belanja Modal Instalasi Karantina tanggal 2 Juli 2023. (revisi terlampir).
- e. REVISI HAL III DIPA TW-3 dan POK tanggal 13 Juli 2023. (revisi terlampir).
- f. REVISI PEMENUHAN GAJI PPPK tanggal 21 Agustus 2023.(revisi terlampir)
- g. REVISI Belanja Pegawai tanggal 19 Oktober 2023. (revisi terlampir).
- h. Revisi Ke-8 Revisi POK tanggal 30 November 2023 (Revisi Terlampir)
- i. Revisi Potensi Blokir Perjalanan Dinas tanggal 30 November 2023
- j. Revisi Ke-8 Revisi POK tanggal 30 November 2023 (Revisi Terlampir)

LAMPIRAN